



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
Jalan Pulau Bangka, Padang Baru, Kec. Pangkalan Baru
Kepulauan Bangka Belitung 33684
Telp. : (0717) 9111513 ; e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id ; website: ptun-pangkalpinang.go.id


Pangkalpinang, 15 Agustus 2025

Nomor : 317/KPTUN.W5-TUN.5/OT1.6/VIII/2025 K e p a d a
Lampiran : 1 (satu) Bundel Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Palembang
Perihal : Tindak Lanjut atas Hasil di –
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja **PALEMBANG**
Tahun 2024

Dengan hormat,

Menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2024 oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan nomor surat 413/KPTTUN.W5-TUN/OT.1.6/IV/2025 Tanggal 28 April 2025, dengan ini kami sampaikan tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PTUN Pangkalpinang Tahun 2024 yang telah diupload pada aplikasi seMAR dan telah diunggah pada link <https://drive.google.com/drive/folders/1Xm9KnscoYrEYUd6fmtlVLY4g1gGQVfT?usp=sharing>

Demikian laporan tindak lanjut ini kami kirimkan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA PANGKALPINANG**
MOHAMAD SYAUQIE

Tembusan :

1. Arsip.




**EVALUASI HASIL TINDAK LANJUT REKOMENDASI LHE SAKIP
UNIT AKUNTABILITAS PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
TAHUN 2024**

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Pelaksanaan		Dokumen Pendukung		Keterangan
			Sudah	Belum	Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Perencanaan Kinerja						
	1. Ke depannya, dokumen RKT, PK, Renstra dan Rencana Aksi dapat mempedomani IKU (untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi agar digabungkan indikatornya sesuai dengan indikator yang terdapat di IKU).	1. Pemisahan indikator upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi pada dokumen perencanaan PTUN Pangkalpinang disebabkan karena perubahan/penggabungan IKU Mahkamah Agung RI tersebut ditetapkan pada 31 Januari 2022 yang masih dalam Periode Renstra 2020 - 2024. Dikarenakan penggabungan ini akan menyebabkan kesulitan perbandingan capaian kinerja per indikator pada Laporan Kinerja dalam kurun waktu Periode Renstra 2020-2024, maka diambil keputusan untuk tetap memisahkan indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dengan Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi untuk memudahkan pengukuran dan perbandingan kinerja pada Laporan Kinerja Tahun 2020-2024. Kesepakatan ini diambil pada Rapat Reviu PK, RKT dan Rencana Aksi Tahun 2024 tanggal 26 November 2024. Pada tahun 2025 yang merupakan tahun awal periode Renstra 2025-2029, indikator Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi telah digabung mempedomani Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022.	√		√		a. Dokumen Keterangan Terkait IKU Banding dan Kasasi yang memuat kesepakatan rapat tanggal 26 November 2024, IKU 2025, PKT 2025 dan Rencana Aksi 2025.
B.	Pengukuran Kinerja						
	1. Agar dilengkapi dengan SK Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja.	1. Telah dilengkapi dengan SK Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja.	√		√		a. Dokumen SK Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Kinerja.



<p>C. Pelaporan Kinerja</p>	<p>1. Agar dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.</p> <p>2. Ke depannya, satker dapat menyertakan narasi perubahan budaya kerjanya ke arah yang lebih baik pada salah satu bagian dalam Laporan Kinerja tahunannya. Namun sebelumnya, Satker harus menentukan dahulu variabel budaya kinerja yang diinginkan, dapat berasal dari internal (misal: 5S, 3S, dan budaya lainnya yang telah ditentukan) atau budaya kinerja yang berlaku umum (contoh: BERAKHLAK). Satker mengangkat adanya kondisi budaya kinerja yang masih silo (terpisah-pisah) dan penyebab kendala kinerja kemudian diidentifikasi dan ditetapkan rencana aksi (action plan). Pada akhirnya, satker juga menyertakan narasi tentang hasil tindak lanjut atas rencana aksi perubahan budaya silo tersebut.</p>	<p>1. Telah dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.</p> <p>2. Ke depannya, satker akan menyertakan narasi perubahan budaya kinerja dalam Laporan Kinerja tahunan.</p>	<p>√</p>		<p>√</p>		<p>a) SOP yang berkaitan dengan pencapaian kinerja.</p>
<p>D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</p>	<p>1. Agar dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.</p>	<p>1. Telah dilengkapi dengan SOP yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi</p>	<p>√</p>		<p>√</p>		<p>1. SOP yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi.</p>

Pangkalpinang, 15 Agustus 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh:
**KETUA PENGADILAN TATA USAHA
 NEGARA PANGKALPINANG**
MOHAMAD SYAUQIE

